



Orangtua ABK Sulit Cari Sekolah

YOGYA. TRIBUN - Sejumlah orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau ABK mengaku kesulitan mencari sekolah untuk anaknya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ini.

Endang, satu di antara wali calon siswa sudah mendatangi SMP berstatus negeri di Sleman. Karena tinggal di Sleman, dia ingin menyekolahkan anaknya di Sleman juga. Namun dia tidak bisa menemukan sekolah yang bersedia menampung anaknya. Menurutnnya, pihak sekolah mengkhawatirkan nanti anaknya tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh guru.

Selain itu, dari pihak sekolah mengaku juga belum mendapatkan petunjuk dari Dinas Pendidikan tentang tata cara menanganai siswa ABK.

"Akhirnya kami ingin anak sekolah di SMP negeri di Bantul saja. Namun, mengingat ru-

KELUHAN - Orangtua ABK menyampaikan keluhannya di Kantor Komite Disabilitas DIY, Selasa (2/7).

Orangtua ABK Sulit Cari

● Sambungan Hal 1

negeri yang siap menerima anaknya, lalu dia memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di Bantul, meskipun jarak dari rumahnya ke sekolah dirasa agak jauh.

Sementara itu, Dwi Hartadayan, wali calon siswa ABK lainnya mengaku sudah mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, karena dia ingin menyekolahkan anaknya di daerah tersebut. Namun, menurutnya, untuk ABK tuna rungu belum bisa diterima.

"Saya coba carikan sekolah mana yang inklusif, baik negeri atau tidak. Kemudian Dinas sana tanya ABK yang apa, saya bilang tuna rungu, dan katanya belum bisa. Saya masih penasaran, kemudian ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, katanya belum ada ketentuan dari pusat," ungkapnya.

Menurutnya, sebenarnya kepastian inilah yang diperlukan oleh wali siswa ABK, karena ditakutkan jika hal seperti ini tidak kunjung dibenahi maka hal serupa bisa terjadi lagi di tahun-tahun selanjutnya.

"Yang saya inginkan sekolah negeri mana yang inklusif. Kuota masing-masing ABK apa berapa, supaya kita tidak campur aduk. Saya ingin kepastian, tahun depan takutnya akan tetap terjadi hal seperti itu," ungkapnya.

Anggota Komite Disabilitas DIY Bidang Pemantauan dan Layanan Pengaduan, Winarta menjelaskan jika penjaminan hak bagi setiap orang untuk bisa mendapatkan pendidikan sudah tercantum dalam undang-undang.

Menurutnya, sampai dengan saat ini masih ada sebagian sekolah negeri yang belum siap menerima siswa ABK.

Hal tersebut pula yang turut membuat orangtua yang belum terlalu percaya untuk menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah negeri.

"Hak anak usia sekolah, tidak memandang siapa itu harus mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah negeri secara halus menyatakan belum siap menerima. Orangtua sudah mengonfirmasi bahwa sekolah negeri belum siap. Kalau ngomongin kepentingan anak cari yang dekat, tapi bagaimana lagi," ungkapnya.

Ketua Komite Disabilitas DIY, Setia Adi Purwanta mengungkapkan, terkait masalah tersebut pihaknya akan segera melakukan mediasi ke berbagai pihak serta meminta kepastian dari Dinas Pendidikan terkait kebijakan PPDB.

"Yang akan kita lakukan mediasi kepada para pihak, baik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi. Pertama menyelesaikan mereka yang terkena kasus ini. Kedua meminta kepastian Dinas Pendidikan yang ada untuk menyusun kebijakan dari SLB ke PPDB," terangnya.

Terpisah, Baskara Aji, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) DIY saat dikonfirmasi mengungkapkan jika semua anak bisa tetap sekolah di sekolah reguler.

Menurutnya, kuota siswa ABK masing-masing rombongan belajar sebanyak 2 orang. Pihaknya juga mengaku tidak pernah melakukan pengabaian ketika ada permasalahan mengenai siswa ABK.

"Tidak ada pengabaian. Kuota ABK maksimal 2 orang per rombongan belajar. Jadi jika ada lima kelas, berarti ada 10. Mereka ABK yang tidak menemui hambatan di sekolah reguler, tetap bisa sekolah di reguler," ungkapnya. (may)

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi
 Untuk Diketahui
 Jumpa Pers

Di. Pendidikan

✓ **Netral**
 ✓ **Biasa**

Plt. Kepala Sekretaris
 Ttd
 Trihastono, S.Sos, MM
 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005